DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Group, Jakarta
- Bambang Poernomo. 1938. Asas-Asas Hukum Pidana Cet. VI, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum PIdana*, Kantor pengacara & Konsultan Hukum
- "Prof.Oemar Seno Adji & rekan, Jakarta, 2002
- Komariah E. Sapardjaja, 2002, Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudens, Alumni, Jakarta, 2002
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum PIdana, Bina Aksara, Jakarta, 1983, Hlm. 22-23., Dalam, Erdianto Efendi
- Moeljatno, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005
- P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- S.R. Sianturi dan E. Y. Kanter, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta
- Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, & Hamza Baharuddin. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional Suyanto dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*.

Sudarto, 2007, Hukum dan Hukum Pidana, Jakarta.

Van Hammel sebagaimana dikutip oleh Moeljatno dalam bukunya , *Pokok-Pokok Hukum Pidana*.

Jurnal:

- Achmad Fauzi, 2017, Tata Kelola Dana Desa dalam Rangka Implementasi Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo, JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik), 5 (1), Maret 2017, 23-40 ISSN 2338-445X (print), ISSN 2527-9246 (online) Link Jurnal: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jkmpLink DOI: https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i1.849 DOI Artikel: 10.21070/jkmp.v5i1.849, (diakses pada tanggal 28 Januari 2022).
- Eddy Suhartono, 2001, Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Buletin
 Pengawasan, http/www/google.com/korupsi, (diakses tanggal 23 Pebruari 2014).
- Muhammad Luthfi Musthafa, 2017, Tesis: Implementasi Pencairan Dan Pengelolaan Dana Desa (Dd) Dan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun Angaran 2016, Op., Cit, hlm. 92-93, (diakses Pada Tanggal 20 Februari 2021).
- Eddy Suhartono, 2001, Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Buletin
 Pengawasan, http/www/google.com/korupsi, (diakses tanggal 2).

Undang-undang:

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Penjelasan Pasal 72 (2) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Ketentuan Pasal 15 PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
- Pasal 10 PMK No. 49/PMK.0.7/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa
- Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

- Pasal 37 PMK No. 49/PMK.0.7/2016 tentang tata cara pengalokasian penyaluran, penggunaan,pemantauan dan evaluasi Dana desa.
- Lampiran Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.